



Kementerian PPN/
Bappenas



Buku Saku

Pemindahan Ibu Kota Negara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia
Juli 2021

TAHUN 2019

"Pada kesempatan yang berasal dari sejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu

Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke pulau **Kalimantan**".

Presiden Joko Widodo



TAHUN 2013

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jakarta.



TAHUN 1997

Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan **Jonggol** sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan.



TAHUN 1957

Presiden Soekarno mengaggas pemindahan Ibu Kota Negara ke **Palangka Raya**, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah.



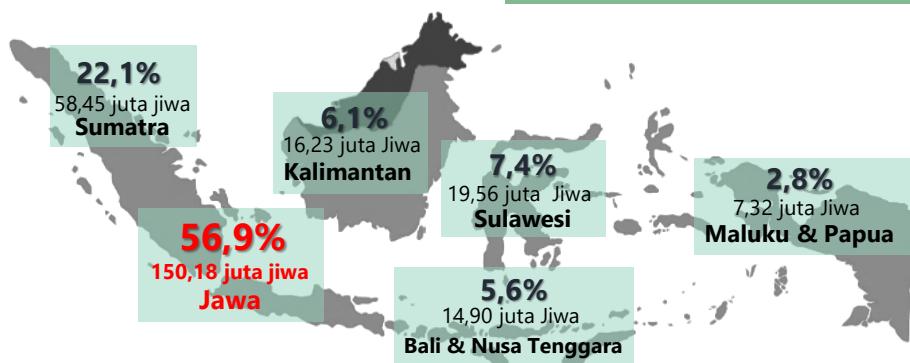


*Kementerian PPN/
Bappenas*



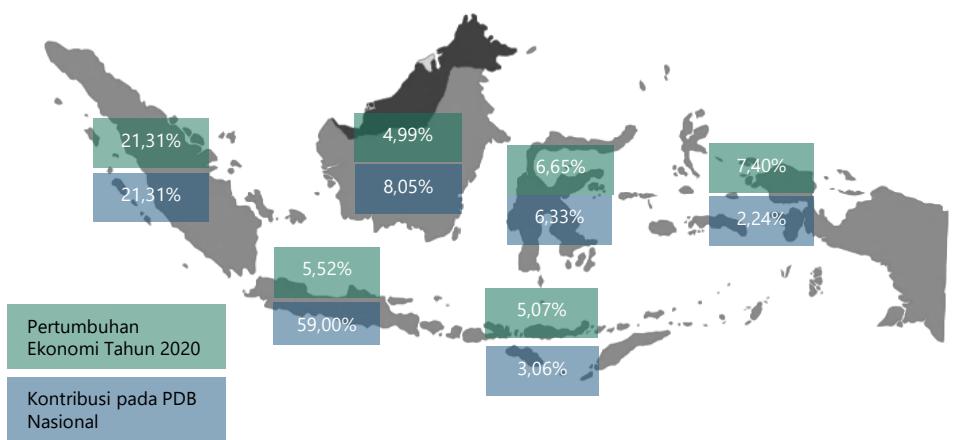
Pindahnya Ibu Kota Negara

Sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas 2015 (Angka tahun 2019)

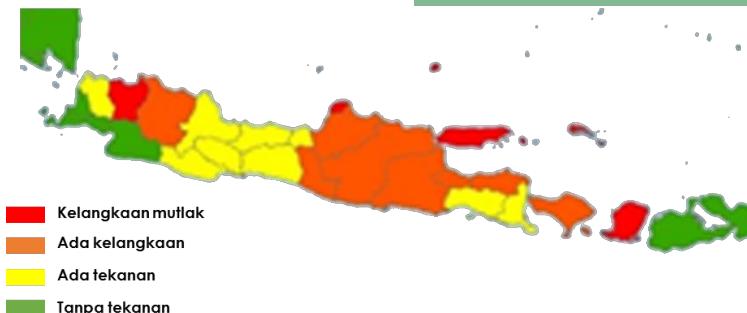
Kontribusi Ekonomi Pulau Jawa
59,0% terhadap PDB Nasional



Sumber: BPS (Feb, 2020)

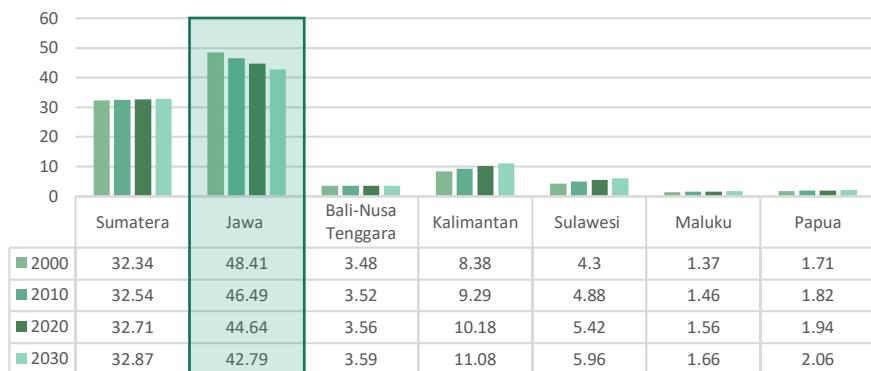
Pindahnya Ibu Kota Negara

Krisis Ketersedian Air di Pulau Jawa Terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur



Saat ini, terjadi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa dan Bali. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Konversi Lahan Terbesar terjadi di Pulau Jawa

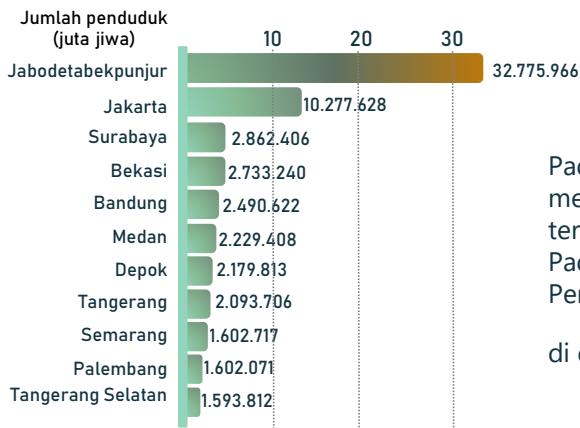


(Sumber: Perhitungan Bappenas)

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar diantara gugus pulau lainnya di Indonesia. Dan tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepannya.

Pindahnya Ibu Kota Negara

Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi : dampak kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat



Pada tahun 2013 Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013). Pada tahun 2017 menjadi Peringkat ke-9 kota terpadat di dunia (WEF, 2017)

Tingginya jumlah penduduk diikuti dengan jumlah pergerakan ulang-alik penduduk yang besar.

- *Commuting Time* 2-3 jam/trip atau 4-5 jam/roundtrip.
- Indeks kemacetan berada di peringkat ke-7 dari 403 kota yang disurvei di 56 negara (Tomtom, 2018).
- Kemacetan tinggi menyebabkan polusi udara. Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia (AirVisual, Agustus 2019).



Pindahnya Ibu Kota Negara

Penurunan Daya Dukung Lingkungan Jakarta

Air Tanah

7,5-10
Cm/tahun
Muka air tanah turun

Kualitas Air

57%
Air waduk tercemar berat

Ketangguhan

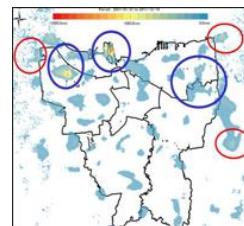
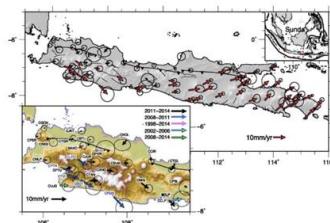
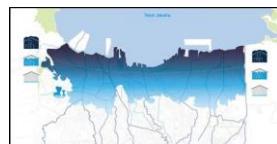
61%
Air sungai tercemar berat

25-50
Cm (tahun 2050)
Kenaikan muka air laut

(Tri Nuke P., 26 Juli 2019, LIPI)

Ancaman bahaya Banjir, Gempa Bumi, dan Tanah Turun di Jakarta

- Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (ideal kota besar minimum 50 tahunan).
- Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas Gunung Api (Krakatau, G.Gede) dan potensi gempa bumi-tsunami Megathrust Selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri.
- Tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007-2017.



Lokasi Penurunan Tanah 2007-2017
(JICA, 2019)

Pembelajaran Pemindahan Ibu Kota Negara Brasilia, Brazil

Lokasi

Berada di tengah negara, sejauh 934 km dari Rio De Janeiro, Ibu Kota Negara sebelumnya



Periode pembangunan

Mulai pembangunan tahun 1957;
Peresmian tahun 1960

Alasan dan Motivasi Pemindahan Ibu Kota

- Memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota modern abad 21
- Mengintegrasikan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan politik di tengah wilayah negara
- Membangun interkoneksi antar wilayah dan memindahkan pusat gravitasi ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah Brasilia
- Ibu kota Brasilia sebelumnya berlokasi di pantai Atlantik, sebagai konsentrasi ekonomi berorientasi ekspor, dengan simbol dominasi kolonial Portugis

Konsep Perencanaan

- Ibu Kota Brasilia dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan budaya Brazil, dan ditegaskan dengan elemen khas Brasilia dalam gaya arsitektur kota
- Master Plan kota Brasilia berbentuk pesawat terbang, melambangkan representasi Brasilia sebagai "the capital of the airplane", tempat pertama dibangunnya akses Jet, berbeda dengan Ibu Kota terdahulu yang lebih menekankan akses kapal laut
- Lebih dari 50% wilayah Brasilia merupakan ruang terbuka hijau meliputi: Park, Green Spaces, Zoo, Botanical Garden, and Sport Complex

Perkembangan Saat Ini

- Jumlah Penduduk 4.5 Juta jiwa (2019) dibandingkan pada saat pertama pemindahan sekitar 136 ribu jiwa (1960)
- GDP \$ 51.715.862 (2015) atau GDP per kapita \$15.506,38 (2012)

Pembelajaran Pemindahan Ibu Kota Negara Canberra, Australia



Lokasi:

Berjarak 472 km dari Melbourne, Ibu Kota Negara sebelumnya.

Periode Pembangunan

Tahap pembangunan 1920 – 1989
Parlemen pindah ke Canberra tahun 1927.

Alasan dan Motivasi Pemindahan Ibu Kota Negara

- Canberra ditetapkan sebagai Ibu Kota baru, mengakhiri debat panjang memilih Melbourne atau Sydney, sebagai ibu kota Australia
- Pemindahan Ibu Kota ke Canberra untuk penguatan identitas bangsa, dan adanya isu politik di Ibu Kota sebelumnya

Konsep Perencanaan:

- Rencana dan desain ibu kota baru diperoleh dari proses kompetisi internasional tahun 1911
- Mengutamakan keserasian lansekap,topografi, dan keindahan (beautiful new city) dalam memilih lokasi
- Gedung pemerintahan terletak di sekitar danau buatan
- Kawasan pemukiman memiliki area terbuka yang luas (1.716 km²)
- Pembangunan Australian National University sebagai magnet untuk mendorong terciptanya pengembangan ekonomi

Sistem Pengelolaan

- Pembentukan *National Capital Development Commission* (NCDP) untuk mengelola perencanaan, pengembangan, dan konstruksi, mempercepat proses pembangunan dengan berpedoman pada "Y Plan"
- *Tahun 1989 dibentuk Australian Capital Territory (ACT) merupakan lembaga pusat yang mengelola Kota Canberra*

Perkembangan Saat Ini

- Jumlah Penduduk 426.700 jiwa (2019) dibandingkan saat awal pemindahan sekitar 5.915 jiwa (1927)
- GDP \$ 39.440.000 (2018) atau GDP per kapita \$ 94.831 (2018)

VISI Seperti apa Ibu Kota Negara yang ideal?



Pilar Pembangunan Indonesia 2045

- Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK
- Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- Pemerataan pembangunan
- Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan



KOTA PALING BERKELANJUTAN DI DUNIA

- Aman dan Terjangkau
- Desain sesuai Kondisi Alam
- Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses
- Sirkuler dan Tangguh
- IKN yang Rendah Emisi Karbon



SIMBOL IDENTITAS BANGSA INDONESIA

- Keindahan khas Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika



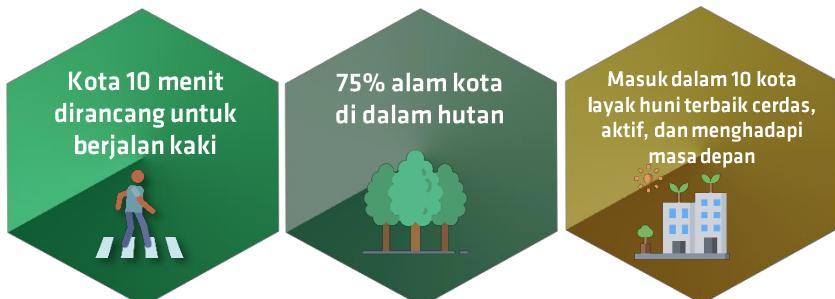
PENGERAK EKONOMI INDONESIA DI MASA DEPAN

- Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi dan Inovasi
- Peluang Ekonomi yang Kuat untuk Semua

8 Prinsip Ibu Kota Negara



3 KPI Khusus yang Akan Mendorong IKN menjadi Kota Kelas Dunia



Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur

Kriteria pemilihan Kalimantan Timur



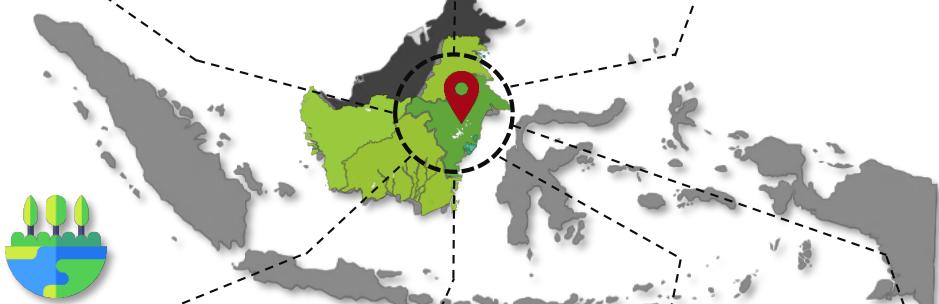
Tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN, untuk mengurangi biaya



Lokasi, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, merepresentasikan keadilan



Potensi konflik sosial rendah, memiliki budaya terbuka terhadap pendatang



Daya dukung tanah dan air baku



Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan



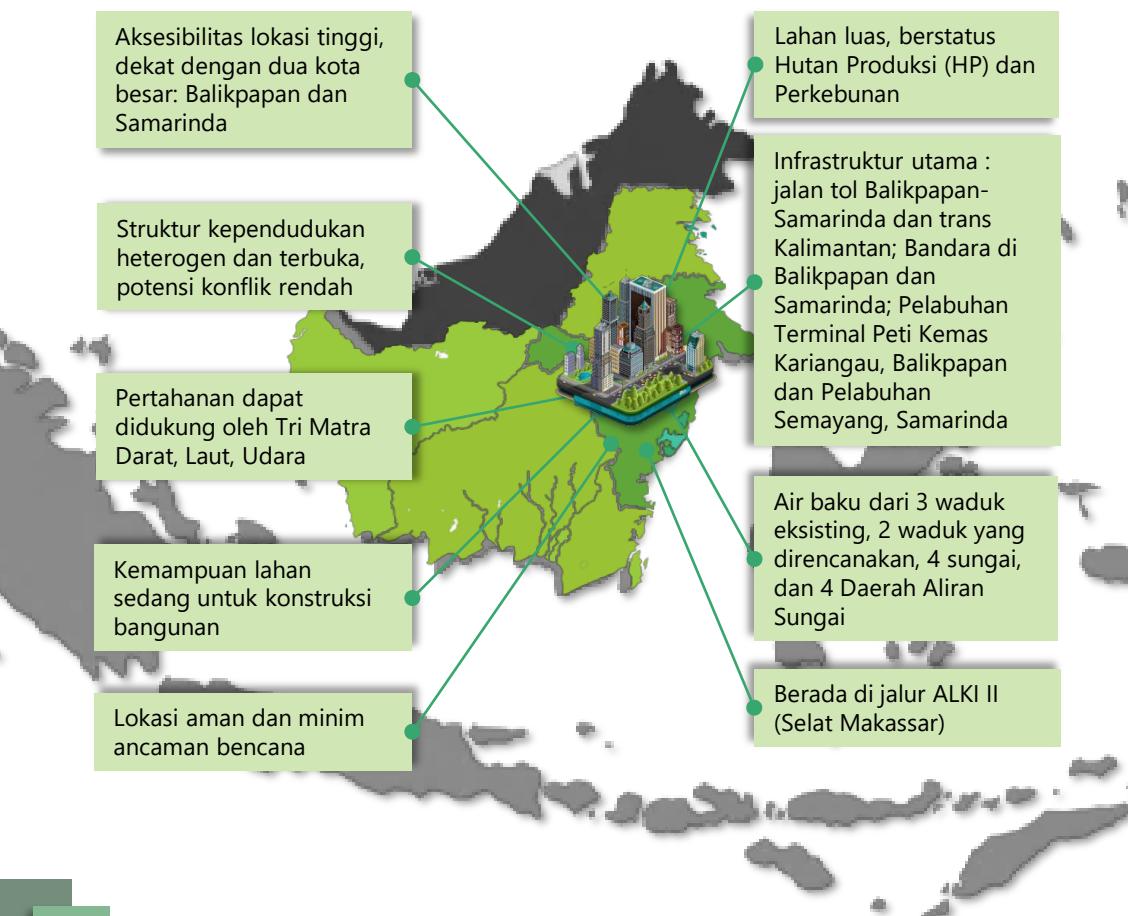
Minimal terhadap bencana alam



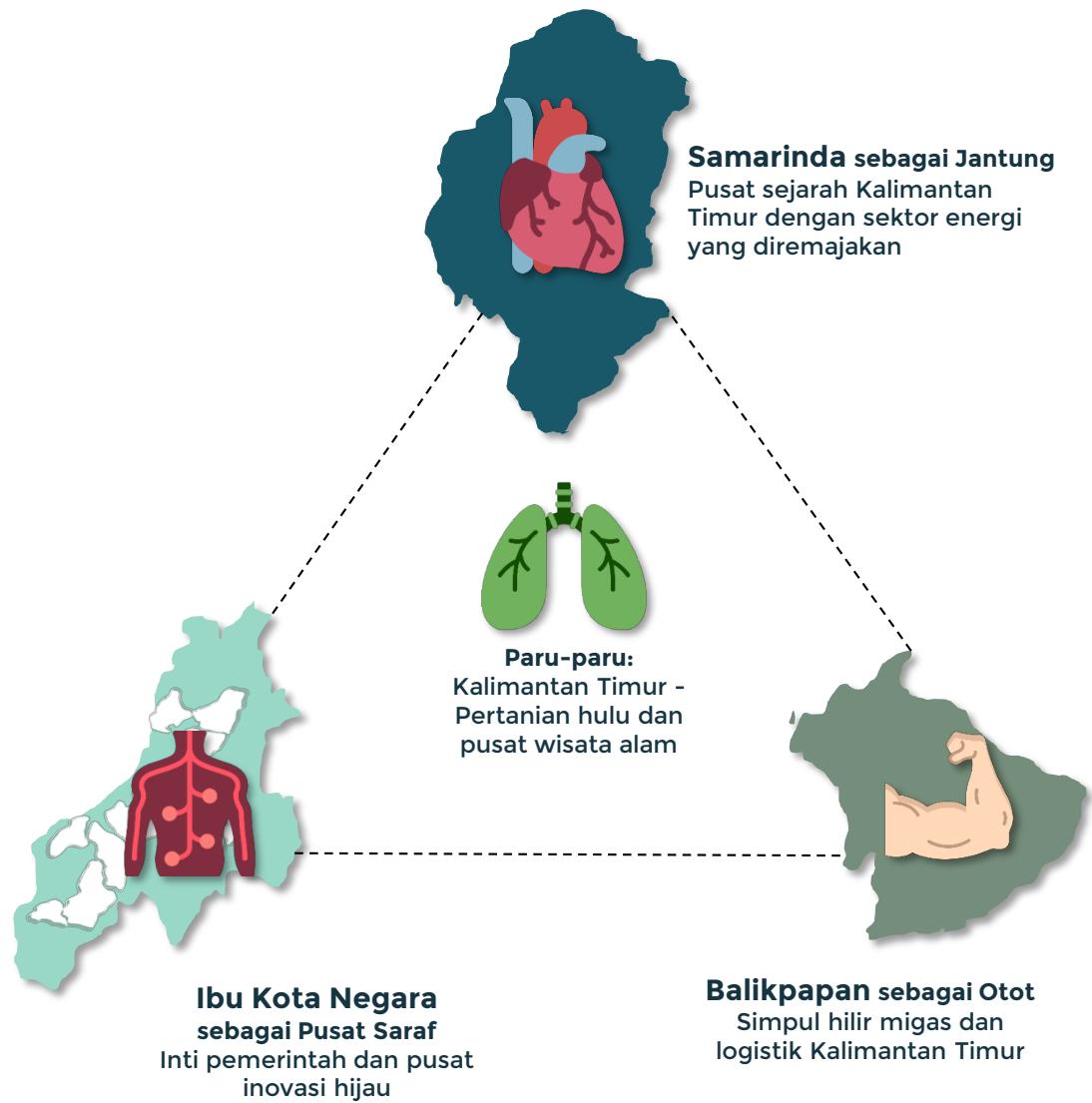
Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur

Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur

Mengapa Kalimantan Timur dipilih?



Ekosistem Tiga Kota sebagai Penggerak Ekonomi Masa Depan



Dasar Hukum

"Payung hukum untuk perpindahan IKN terus dirampungkan. Regulasi dasar IKN adalah Rancangan Undang-Undang IKN yang menjadi pembahasan di Program Legislasi Nasional (Proglenas) Prioritas 2021. Di dalamnya termasuk pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan, mengawasi, dan mengatur segala hal terkait pembangunan dan pengembangan IKN. Selain itu, akan disusun peraturan pelaksana setingkat Peraturan Presiden untuk mengatur beberapa hal."



Rancangan Undang-undang

Ibu Kota Negara

Rancangan Peraturan Presiden



Penetapan Kawasan Strategis Nasional Calon Ibu Kota Negara

Rancangan Peraturan Presiden



Otorita Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara

Rancangan Peraturan Presiden



Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara

Rancangan Peraturan Presiden



Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara

Rancangan Peraturan Presiden



Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara

Zonasi Ibu Kota Negara

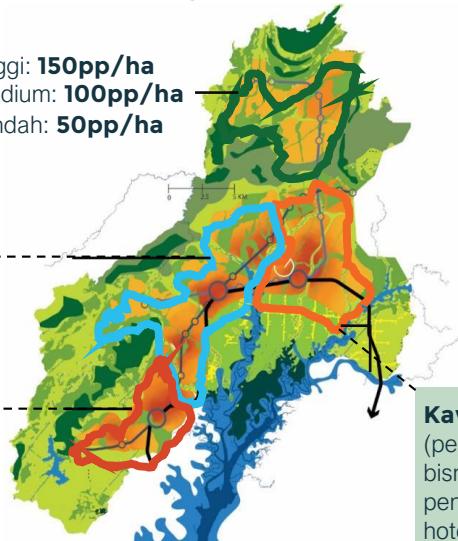
- Kepadatan tinggi: 150pp/ha
- Kepadatan medium: 100pp/ha
- Kepadatan rendah: 50pp/ha

Kawasan Barat IKN

(perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, perguruan tinggi)

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan - KIPP

(pemerintahan nasional dan *smart government*, perkantoran)



Kawasan Timur IKN

(perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, hotel bisnis, MICE)

IKN (256.142,72 ha)

- Akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan kota Balikpapan dan Samarinda
- 75% kawasan IKN akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dimana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan.
- IKN dikembangkan dengan 100% *clean energy*

K-IKN (56.180,87 ha)

- Terdiri dari berbagai zona *mixed-use* dan *neighborhood* yang mendukung konsep “10 menit berjalan kaki” dan konektivitas sosial
 - Didesain selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau
 - 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk
- 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan

Kawasan Ibu Kota Negara

K-IKN: Kota di dalam kawasan hutan, naungan ‘hijau dan biru’ yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat

- Harmoni dengan alam
- Mengutamakan pejalan kaki



Perumahan ASN – dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep *walkability* dan memfasilitasi hubungan sosial



KIPP – Pusat pemerintahan dan kawasan permukiman

- Desain berkelanjutan
- Mendukung konsep *walkability*
- Kemudahan aksesibilitas
- Sirkulasi angin
- Area bebas kendaraan



Sumber: Kementerian PUPR, 2020

Ibu Kota Negara sebagai Superhub

*Superhub IKN bersifat *locally integrated, globally connected, dan universally inspired**

Superhub sebagai Inspirasi Universal

Superhub yang menjadi teladan sebagai kota yang **hijau, berkelanjutan, dan bertaraf hidup tinggi** di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi



Superhub dan Dunia

Superhub yang membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam **jalur perdagangan dunia, arus investasi dan inovasi teknologi**

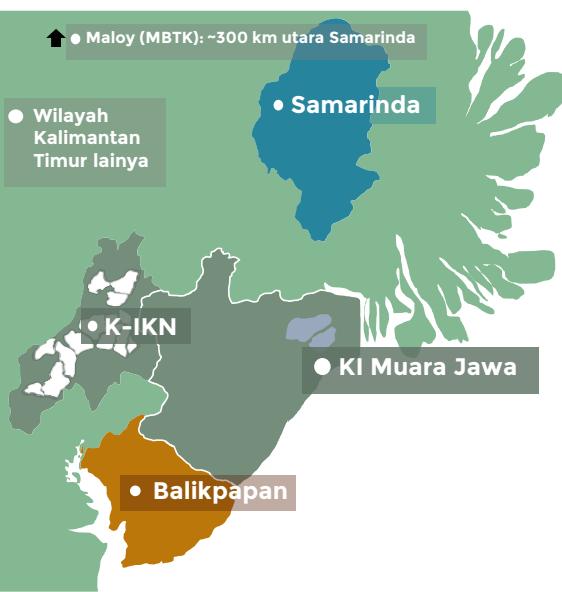


Superhub dan Indonesia

Superhub yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui **strategi Tiga Kota**, dengan menjadi **penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur dan pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik** di seluruh Kawasan Timur Indonesia dan seluruh Indonesia



Sebaran Sektor Ekonomi dan Industri di IKN dan Kalimantan Timur



● Balikpapan



Energi Rendah Karbon



Bahan Kimia dan Produk Kimia: Petrokimia



Farmasi Terintegrasi: Bahan aktif obat-obatan generik

● Samarinda



Sektor Energi Rendah Karbon

● Wilayah Kalimantan Timur lainnya



Industri Pertanian Berkelanjutan



Ekowisata



Energi rendah karbon

● K-IKN (dlm area 56.000 ha)



Pusat badan litbang dan inovasi



Ekowisata, Pariwisata kota, bisnis, medis dan kebugaran



Industry 4.0 dan *smart city*



Pendidikan abad ke-21

● Kawasan Industri (KI) Muara Jawa



Energi Rendah Karbon: E2W dan panel surya



Farmasi Terintegrasi: Biosimilar dan Vaksin



Industri Pertanian Berkelanjutan



● Maloy (MBTK)

Bahan Kimia dan Produk Kimia: Oleokimia

Dampak Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Negara



Jangka Pendek :
Masa Konstruksi



Jangka Menengah
dan Panjang



Mendorong Ekonomi
Melalui Investasi
Infrastruktur



Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi



Mendorong
Perdagangan Antar
Wilayah di
Indonesia



Mendorong
Peningkatan Sektor
Non-Tradisional



Mendorong
Output Sektor Lain



Mendorong
Diversifikasi Ekonomi
di Kalimantan



Mendorong
Penciptaan
Kesempatan Kerja



Meningkatkan
Perdagangan Antar
Wilayah



Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi



Ketimpangan
Pendapatan
Menurun

Tahapan menuju 2045: Tahapan perwujudan IKN

2020-2024

Pemindahan tahap awal ke KIKN



- Membangun infrastruktur utama (mis. Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR) dan perumahan di area Utama KIKN
- Pemindahan ASN tahap awal (mis. TNI, Polri, MPR)
- Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi (mis. air, energi, rail) untuk 500rb penduduk di tahap awal
- Presiden pindah ke KIKN sebelum 16 Agustus 2024 dan merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan RI di KIKN pada tanggal 17 Agustus 2024

Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas

2025-2035

Membangun IKN sebagai Area Inti yang Tangguh



- Mengembangkan fase kota berikutnya (mis., pusat inovasi dan ekonomi)
- Menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN
- Mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas
- Menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas
- Mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)



2035-2045

Membangun seluruh
infrastruktur & ekosistem
3 kota untuk percepatan
pembangunan Kaltim



2045 onwards

Mengkokohkan reputasi
sebagai “Kota Dunia
untuk Semua”



- Memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota
- Destinasi FDI No. 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia
- 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi talenta global
- Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan *enablers* ekonomi sirkuler
- Mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta

- Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing
- 10 besar *livable city* di dunia
- Mencapai *net zero-carbon emission* dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang – kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk >1jt jiwa yang akan mencapai target ini



Pemindahan IKN dan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Upaya



Simplifikasi Proses Bisnis

Penyederhanaan proses bisnis dan urusan pemerintahan



Pemerintahan Digital

Ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor



Penguatan Koordinasi

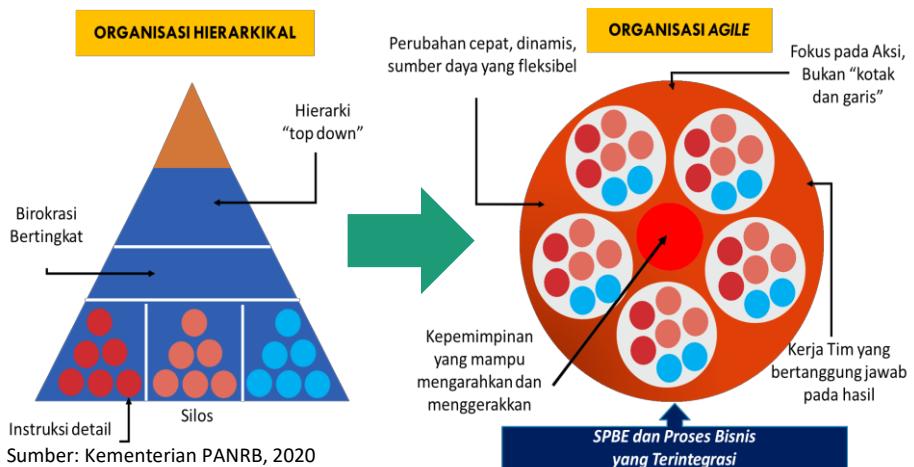
Pengembangan jejaring institusi



Penataan Manajemen ASN

Penataan manajemen ASN di K/L, mengacu pada penguatan kompetensi *smart governance*

Peralihan dari Struktur Organisasi Hirarkis ke Organisasi Agile



Transformasi Cara Bekerja di IKN Baru

Kompleks Kementerian dan Lembaga



Pedestrian bridge

50-80%

Penggunaan Energi Alternatif (KPI)

80%

Bangunan dan Koridor Jalan tidak menghalangi pergerakan angin (KPI)

Green building untuk penghematan energi kawasan



Sumber: Kementerian PUPR, 2020

- Perkantoran pemerintahan di IKN Baru dibangun dalam konsep kantor bersama (*sharing offices*) antar rumpun Kementerian/Lembaga.
- Mengedepankan konektivitas antar Kementerian/ Lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model '*smart office*' (perkantoran pintar).
- Perkantoran pemerintahan dibangun berprinsip hijau dan berkelanjutan serta mengedepankan *open layout*.



Transformasi tempat kerja di IKN Baru akan diperkuat dengan perubahan cara kerja melalui ***flexible working arrangement*** melalui *informal workspace* dan berbasis digital

Sumber: Eko Prasojo, 2021

Potensi Sumber Pembiayaan IKN

Pemanfaatan Aset/Barang Milik Negara (BMN) Di Jakarta

Alternatif Strategi Optimalisasi Aset/BMN

1 Perubahan Peruntukan Aset (*Asset Repurposing*)

2 Optimalisasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

3 Konsolidasi Aset (*Asset Consolidation*)

4 Pemanfaatan Aset di Jakarta oleh Pihak Ketiga Potensial

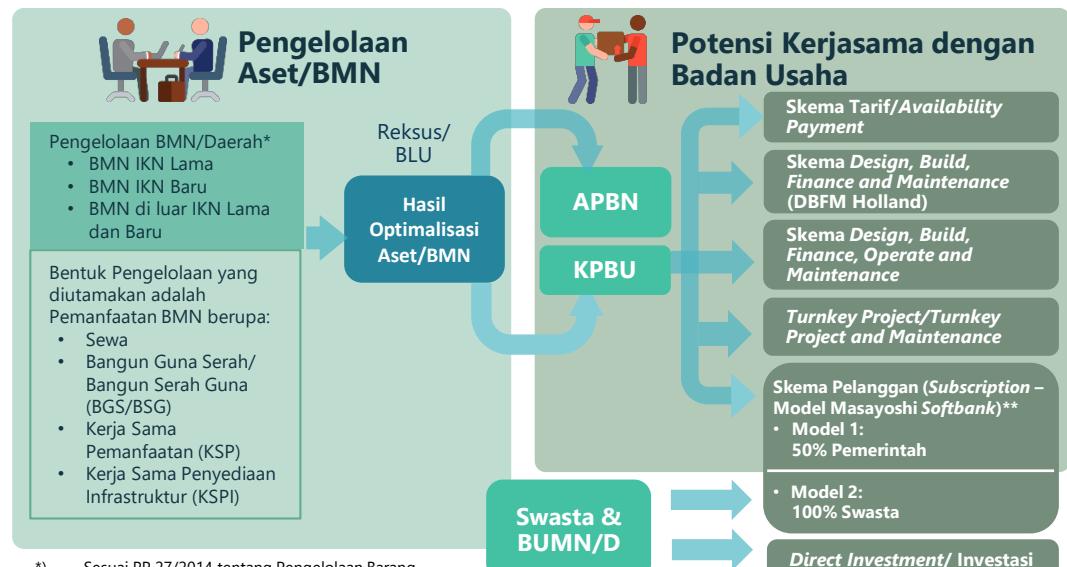
Penerapan alternatif strategi optimalisasi aset/BMN sangat berkaitan dengan:

Master Plan Jakarta

Memberikan daya tarik sekaligus kepastian rencana pengembangan ekonomi/bisnis bagi pengusaha

Tahap Pemindahan K/L ke IKN Baru

Mempengaruhi perhitungan pemanfaatan aset/BMN



*) Sesuai PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**) Usulan investor yang masih diperlukan analisis mendalam.

Pendanaan IKN

466 T
Mayoritas
melalui KPBUs



Skema
APBN
(Langsung)*

- Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI (pangkalan militer)
- Pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses)
- *Diplomatic Compound* (lahan)
- Ruang terbuka hijau (termasuk taman budaya)
- Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI



Skema
KPBU**

- Infrastruktur dasar dan utilitas (selain yang telah tercakup dalam APBN)
- Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI (selain yang telah tercakup dalam APBN)
- Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
- Peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, dan jalan tol/non-tol)***
- Sarana pendidikan, museum, dan sarana kesehatan



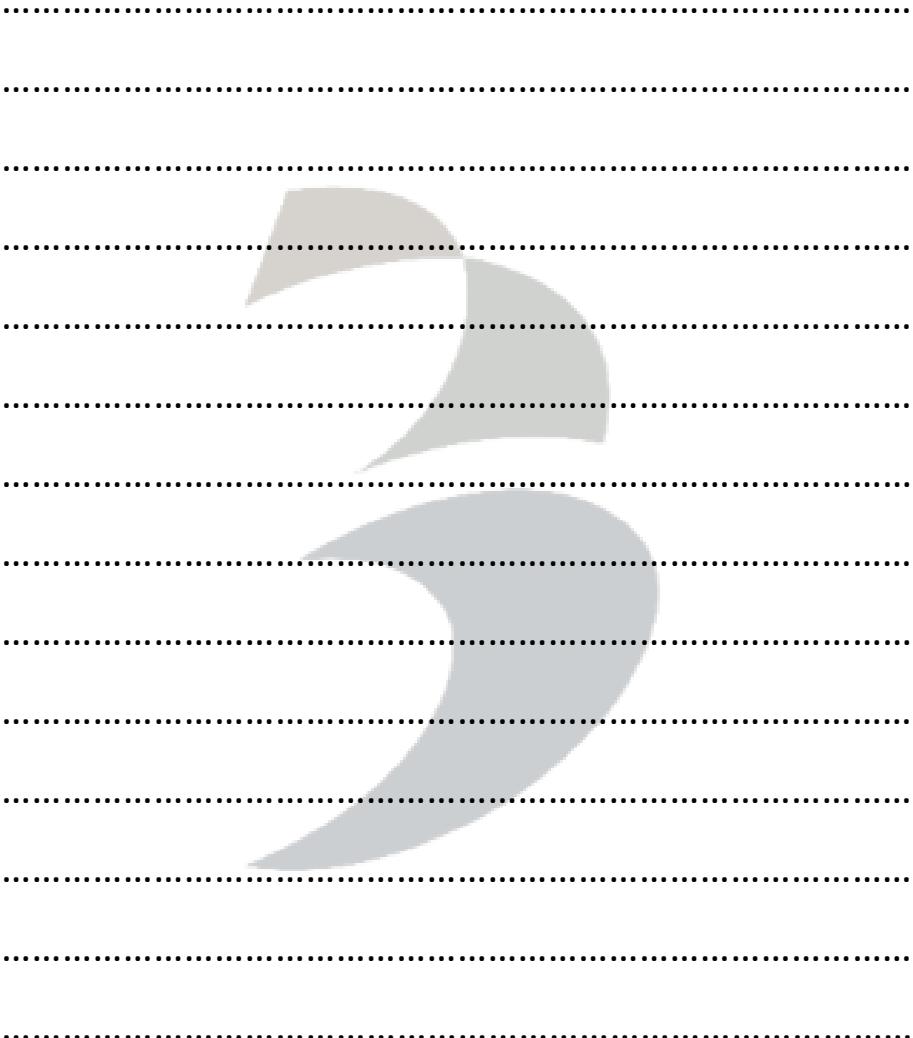
Skema
Swasta &
BUMN/D

- Perumahan umum
- Pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta
- *Science-technopark*
- Sarana kesehatan swasta
- Pusat perbelanjaan/*shopping mall*
- *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE)

*) Sebagian menggunakan skema pengelolaan aset/Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme PNBP-*earmark*.

**) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat berupa *Availability Payment* (AP) atau Tarif/*User Charge*. Selain itu, Pemerintah memiliki beberapa skema dalam penyediaan infrastruktur antara lain, yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

***) Bandara dan Pelabuhan diupayakan merupakan pembiayaan BUMN (murni), namun dapat dipertimbangkan menjadi skema KPBU.





**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
Jl. Taman Suropati No.2 Menteng - Jakarta Pusat